



# Relokasi Pedagang Digelar Bulan Ini

## ■ Sultan Sebut Aktivitas Usaha di Jalan Perwakilan Ilegal

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan untuk membersihkan bangunan sisi utara Jalan Perwakilan, Kawasan Malioboro di bulan ini. Para pedagang pun diminta untuk dapat segera mengosongkan lapaknya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sumadi mengatakan, pembongkaran bangunan di Jalan Perwakilan masih terus berproses. Namun, dia enggan menyebut secara pasti kapan upaya pembongkaran bakal dilakukan.

"Sekarang sedang berproses, mudah-mudahan lancar, semua kan untuk kepentingan kita semua warga Jogja," ujar Sumadi, Selasa (3/1).

Dia mengklaim antara Pemkot Yogya dan pedagang telah mencapai kesepakatan bahwa Jalan Perwakilan akan segera dibersihkan di awal tahun. Sebab kawasan itu akan dimanfaatkan untuk proyek pembangunan Jogja Planning Gallery yang digagas oleh Pemda DIY.

"Kesepakatannya *ngoten niku*, mudah-mudahan saja (awal Januari bersih dari pedagang)," ujarnya.

Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut para pedagang

### PENATAAN KAWASAN

- Pemkot Yogya menargetkan pembersihan bangunan sisi utara Jalan Perwakilan, Kawasan Malioboro di bulan ini.
- Para pedagang diminta untuk dapat segera mengosongkan lapaknya.
- Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyebut aktivitas usaha di kawasan itu ilegal.
- Paguyuban pedagang meminta solusi terbaik.

yang menjalankan aktivitas usaha di sepanjang Jalan Perwakilan, Kota Yogyakarta, ilegal. Dia menyebut, Keraton Yogyakarta tidak memberi izin melalui surat kekancingan agar para pedagang dapat membuka usaha di kawasan yang menempati Tanah Kasultanan atau Sultan Ground tersebut.

"Ya nggak, nggak mungkin (mengeluarkan surat kekancingan). Pemda saja kan tidak mengeluarkan izin berarti ilegal, dia (pedagang) paham nggak kalau itu ilegal," kata Sri Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Sultan mengatakan, kawasan itu sempat dikosongkan dari aktivitas perdagangan sebelum masa pandemi Covid-19 menerpa. Keraton Yogyakarta pun memutuskan untuk tidak memperpanjang surat kekancingan untuk pemanfaatan lahan di ka-

wasan tersebut kecuali pada bangunan sebelah barat atau Restoran Legian di Malioboro. Namun, bangunan di Jalan Perwakilan nyatanya tetap digunakan untuk berjualan oleh pedagang.

"Sri Sultan pun tidak mengetahui bagaimana pedagang bisa berjualan di sana padahal bangunan-bangunan di kawasan itu sudah dikunci. Begitu pula dengan para pelaku usaha yang membayar sewa. Sri Sultan tidak mengetahui ke mana uang sewa itu mengalir dan siapa pihak yang menyewakannya.

"(Dulu) karena disuruh pindah, pindah semua. Mereka kosong. Dikunci. Tinggal yang sebelah barat yang kebakar itu (Restoran Legian). Pada bisa masuk ke situ saya diam saja. Itu (mereka) membongkar atau apa. Kalau ada yang narik duit (sewa) siapa yang menarik," tandas Sultan.

Sri Sultan pun mengaku siap bertemu dengan perwakilan pedagang. Terlebih sebelumnya, para pedagang di Jalan Perwakilan telah mengirim surat terbuka kepadanya. "Kalau dia benar mau ketemu sama saya saya tanya berani nggak mengeluarkan pernyataan duit itu kalau keluar buat yang nyewa itu siapa. Tapi katanya mau ketemu sama saya tapi saya belum baca suratnya," ujar Sultan.

### Solusi terbaik

Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP), Adi Kusuma Putra Suryawan, mengatakan, pedagang masih kukuh untuk tetap berjualan di Jalan Perwakilan hingga pemerintah dapat mencari solusi terbaik. Saat ini, pihaknya masih berupaya untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah untuk meminta kejelasan terkait nasib mereka setelah digusur.

Terlebih pihaknya telah menerima Surat Edaran dari Pemkot Yogya yang berisi instruksi untuk segera mengosongkan lapak masing-masing paling lambat hari ini, Selasa (3/1). "Kami dapat SE untuk mengosongkan tanggal 3 ini. Suratnya baru tadi pagi diberikan," ujarnya. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005